

Nomor : B/348/AA.05/2024
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

3 September 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
di
Waikabubak

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Sumba Barat**. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menindaklanjuti **sebagian kecil** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu atas rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang sudah ada sebagai usulan rencana perbaikan perencanaan kedepan kepada pimpinan daerah;
- b. Melakukan reviu definisi operasional dan formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) usulan rencana perbaikan perencanaan kedepan;
- c. Melakukan penyelarasan antara informasi kinerja yang dituangkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja (LAKIP) beberapa Perangkat Daerah (PD) dengan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan;
- d. Melakukan evaluasi AKIP Internal pada seluruh Perangkat Daerah.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Pemerintah Kabupaten Sumba Barat** menunjukkan bahwa nilai sebesar **52,22** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Cukup”**, yaitu **implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	17,92	17,97
2. Pengukuran Kinerja	30	15,49	15,49
3. Pelaporan Kinerja	15	8,82	8,83
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,94	9,93
Nilai Hasil Evaluasi	100	52,17	52,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Sumba Barat** tahun 2024 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan reviu PK Bupati dan sebagian PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kepedulian pimpinan dan jajaran atas pemahaman dan rasa kepemilikan kinerja masih kurang. Hal ini dilihat dari rumusan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan masih bersifat *output* dan belum berdasarkan tugas dan fungsi dari setiap jenjang jabatan;

- b. Pada perencanaan kinerja tingkat kabupaten dan PD belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcome*) dan indikator kinerja yang tidak *Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Time Bound* (SMART) dan Cukup;
- c. Terdapat ketidakselarasan kinerja pada perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang mengakibatkan informasi capaian kinerja tidak dapat dilihat tren kemajuannya.

2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan reviu dokumen IKU Bupati dan sebagian PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum terdapat pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja tingkat pemerintah daerah maupun PD;
- b. Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- c. Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* sehingga belum sepenuhnya budaya kinerja terbentuk dengan baik;
- d. Salah satu rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah melakukan pengukuran dan pengumpulan kinerja secara triwulanan karena saat ini masih dilakukan satu tahun sekali.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan perbaikan dalam penyajian informasi dalam LPPD dan LAKIP seluruh PD dengan melakukan penyelarasan antara informasi kinerja yang dituangkan pada LPPD dan LAKIP beberapa PD dengan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik

berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;

- c. Laporan kinerja beberapa PD belum menyajikan informasi analisis capaian kinerja yang cukup sebagai bentuk akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan evaluasi AKIP internal dengan memperluas jumlah PD yang dievaluasi, sehingga seluruh PD telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP oleh tim evaluator internal. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Peran inspektorat dalam mengawal perbaikan tata kelola pemerintah belum optimal. Hal ini terlihat dari belum dilakukannya evaluasi internal atau mandiri yang harus dilakukan seperti evaluasi AKIP pada PD dan rencana aksi (general-tematik) Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumba Barat.
- b. Belum terdapat catatan dan rekomendasi perbaikan yang spesifik atas evaluasi AKIP kepada setiap PD yang dievaluasi. Rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum sehingga evaluasi AKIP belum dapat menunjang perbaikan kualitas AKIP secara signifikan;
- c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat beberapa kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai;
- d. Monitoring terhadap rencana tindak lanjut hasil evaluasi AKIP internal belum dilakukan secara intensif sehingga belum dapat dipastikan rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti dengan baik oleh setiap PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mendorong komitmen dan rasa kepemilikan kinerja bersama, mulai dari pimpinan daerah hingga seluruh jenjang jabatan individu, dengan memastikan setiap jajaran memahami kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu strategis masing-masing;
- 2) Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan

sasaran strategis berorientasi hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang SMART dan Cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;

- 3) Memastikan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;
- 4) Menyusun pedoman pengukuran kinerja yang juga mencakup bagaimana mekanisme pengumpulan data kinerja sebagai salah satu proses awal dalam pengukuran kinerja. Pedoman yang nantinya disusun dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk memastikan seluruh PD telah melaksanakan pengukuran kinerja secara ideal;
- 5) Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
- 6) Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan secara aktif menyampaikan pengukuran capaian kinerja, dan pimpinan memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk *controlling* terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki;
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
- 8) Memperbaiki kualitas dokumen laporan akuntabilitas kinerja level pusat dan unit kerja, diantaranya dengan menyajikan informasi secara detail dan mendalam terkait analisis penyebab tercapai/tidaknya setiap indikator kinerja, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 9) Menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja secara lebih mendalam dan spesifik/rinci, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
- 10) Meningkatkan kualitas laporan kinerja khususnya pada level PD dengan menyajikan informasi analisis capaian kinerja yang cukup sebagai bentuk akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja ke depan;

- 11) Merekomendasikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk memperkuat fungsi dan peran inspektorat. Untuk selanjutnya Inspektorat dapat melakukan evaluasi dan/atau audit mandiri atau internal terhadap seluruh PD.
- 12) Memperbaiki kualitas pelaksanaan evaluasi dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang lebih spesifik kepada setiap PD dengan memberikan informasi konkrit poin perbaikan yang harus ditindaklanjuti yang kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Internal;
- 13) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
- 14) Mendorong pelaksanaan monitoring secara berkala rekomendasi yang diberikan kepada PD melalui LHE internal guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilakukan dalam menjawab rekomendasi tersebut telah sesuai dengan yang diinginkan oleh evaluator internal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Bupati Sumba Barat.